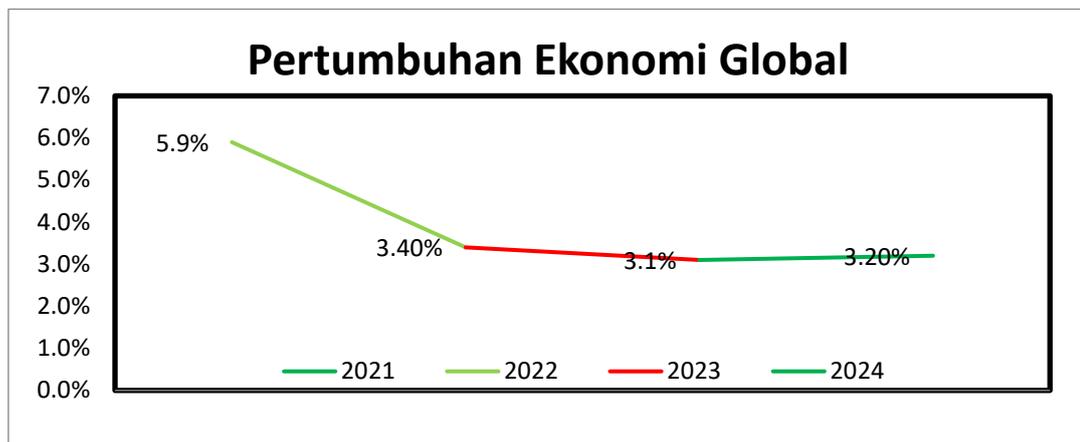


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlambatan ekonomi global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini, terutama dalam konteks sektor manufaktur di Indonesia. Berdasarkan data dari World Economic Outlook IMF, pertumbuhan ekonomi global menunjukkan perlambatan dari 5.9% pada tahun 2021 menjadi 3.,4% pada tahun 2022, dan turun kembali menjadi 3,1% pada tahun 2023, dan mengalami perlambatan kenaikan sebesar 3,2% pada tahun 2024. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakpastian ekonomi global yang dapat berdampak pada kinerja perusahaan manufaktur di Indonesia yang bergantung pada ekspor dan impor bahan baku. Ketidakpastian ini sering kali berujung pada *financial distress*, yang mengancam keberlanjutan bisnis perusahaan jika tidak dikelola dengan baik (Pradana, 2020). Studi lain juga menunjukkan bahwa faktor internal seperti struktur modal dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*, terutama dalam sektor industri dasar dan kimia (Safitri & Yuliana, 2021)

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Global

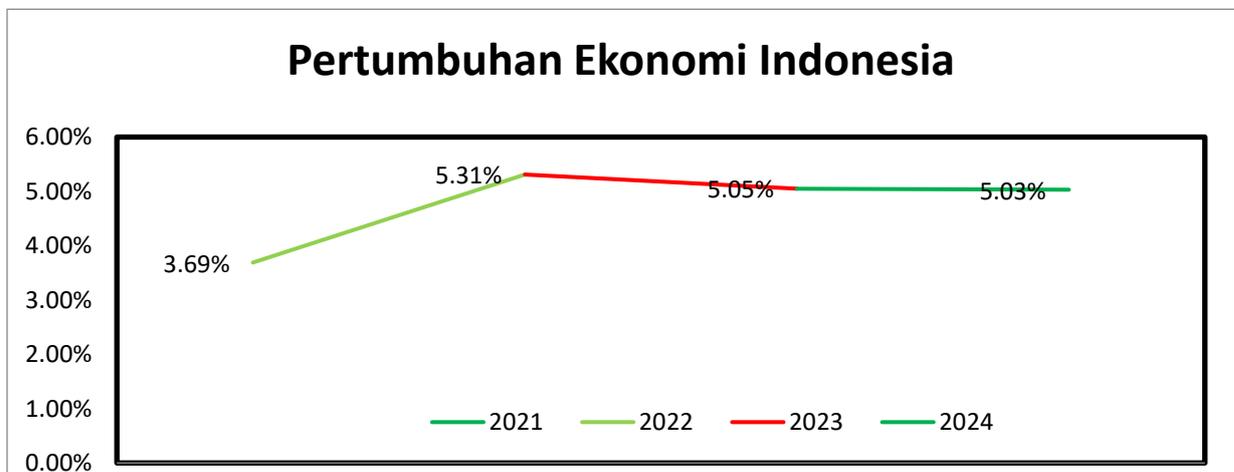
Sumber : World Economic Outlook IMF

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global menciptakan tantangan besar bagi sektor manufaktur Indonesia yang memiliki keterkaitan erat dengan pasar global. Studi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi global yang fluktuatif dapat menyebabkan *financial distress* bagi perusahaan manufaktur yang bergantung pada permintaan ekspor, terutama di sektor industri barang konsumsi. Faktor eksternal seperti tingkat bunga pinjaman yang meningkat dan kebijakan perdagangan global juga berkontribusi terhadap menurunnya daya saing industri manufaktur dalam negeri (Utami & Taqwa, 2023). Selain itu, perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga berdampak pada penurunan laba beberapa perusahaan besar di sektor manufaktur barang konsumsi (Ramadhany & Syofyan, 2021). Tidak hanya itu, harga bahan baku yang tidak stabil akibat gangguan pasokan global semakin memperparah kondisi keuangan perusahaan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menjaga profitabilitas dan

efisiensi operasionalnya memiliki kecenderungan lebih besar mengalami *financial distress* (Fatmayuni et al., 2024).

Berdasarkan data dari BPS Indonesia pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami perlambatan yang selaras dengan kondisi ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari 3.69% pada tahun 2021 menjadi 5.31% pada tahun 2022, namun mengalami perlambatan menjadi 5.05% pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 5.03% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa dampak dari perlambatan ekonomi global turut dirasakan di Indonesia. Perlambatan pertumbuhan ini semakin menegaskan bahwa sektor manufaktur di Indonesia menghadapi tekanan dari berbagai faktor makroekonomi yang dapat meningkatkan risiko *financial distress*.

Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

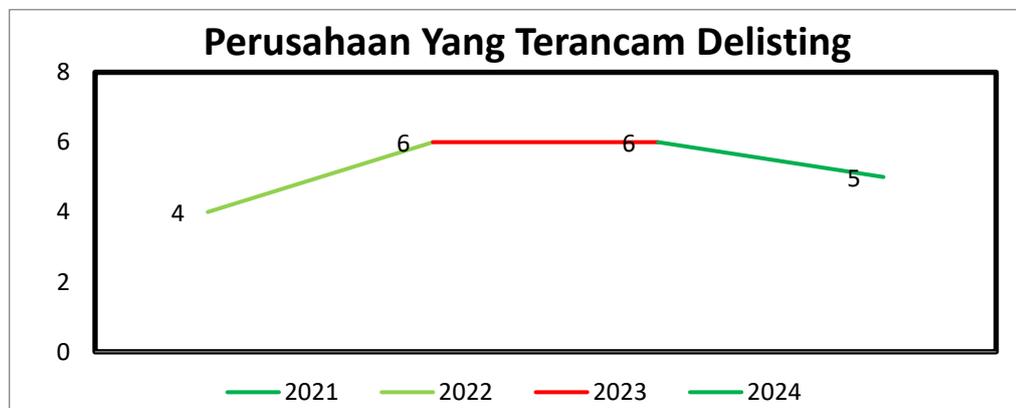


Sumber Data : BPS Indonesia

Di sisi lain, jumlah perusahaan yang terancam delisting di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024 juga menunjukkan pola yang bervariasi. Berdasarkan data dari BPS Indonesia, pada tahun 2021 terdapat 4 perusahaan yang terancam delisting, jumlah ini meningkat menjadi 6 perusahaan

pada tahun 2022 dan tetap berada di angka 6 perusahaan pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 jumlahnya mengalami sedikit penurunan menjadi 5 perusahaan. Meskipun terjadi fluktuasi, angka ini tetap menunjukkan bahwa ada ketidakstabilan yang dialami oleh perusahaan yang terdaftar di BEI, yang dapat dikaitkan dengan tekanan ekonomi domestik dan global yang berkelanjutan. Stabilitas makroekonomi yang terganggu, termasuk faktor nilai tukar dan inflasi, menjadi penyebab utama peningkatan jumlah perusahaan yang menghadapi risiko *financial distress* dan kemungkinan delisting dari pasar modal. Stabilitas makroekonomi diyakini berperan dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan meminimalkan jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan finansial ekstrem hingga akhirnya harus keluar dari pasar modal (Wijaya & Suhendah, 2023).

Gambar 1. 3 Perusahaan yang Terancam Delisting



Sumber Data: Bursa Efek Indonesia

Perusahaan dapat terancam delisting dari Bursa Efek Indonesia akibat berbagai faktor, yang sebagian besar berkaitan dengan kondisi *financial distress*. Salah satu penyebab utama adalah penurunan kinerja keuangan yang signifikan, seperti merosotnya pendapatan, meningkatnya beban utang, dan ketidakmampuan

perusahaan untuk menghasilkan laba yang berkelanjutan (Utami & Taqwa, 2023). Studi menunjukkan bahwa *financial distress* terjadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya akibat penurunan aktivitas operasi, likuiditas aset yang buruk, dan tingginya biaya tetap yang ditanggung oleh perusahaan (Utami & Taqwa, 2023). Jika sebuah perusahaan mengalami kerugian berturut-turut selama beberapa tahun, maka perusahaan cenderung akan memasuki fase *Financial distress*, yang pada akhirnya dapat menyebabkan delisting dari Bursa Efek Indonesia (Pradana, 2020). Lebih lanjut, tingginya rasio leverage dan ketergantungan terhadap utang yang tinggi juga meningkatkan kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*, yang dapat berujung pada penghapusan pencatatan saham (Pradana, 2020).

Fenomena di sektor manufaktur menunjukkan adanya kondisi keuangan yang kritis, di mana tercatat sebanyak 12 perusahaan manufaktur berada di ambang delisting. Hal ini mencerminkan permasalahan mendasar seperti penurunan pendapatan, meningkatnya beban utang, serta ketidakmampuan menghasilkan laba secara berkelanjutan, yang berujung pada *Financial distress* (Wijaya & Suhendah, 2023). Kondisi ini tidak hanya mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan, tetapi juga menurunkan kepercayaan investor dan mempengaruhi stabilitas pasar modal (Fatmayuni dkk., 2024). Oleh karena itu, fenomena ini menjadi alasan kuat untuk mengangkat penelitian ini guna mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor penyebab terjadinya *Financial distress* di sektor manufaktur, serta merumuskan strategi-strategi perbaikan yang dapat mencegah risiko delisting.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap ancaman delisting adalah tingkat likuiditas saham yang rendah, di mana saham perusahaan tidak aktif diperdagangkan akibat rendahnya minat investor (Safitri & Yuliana, 2021). Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki likuiditas rendah sering kali menghadapi risiko *financial distress* yang lebih tinggi karena kesulitan dalam memperoleh pendanaan dan menarik investor potensial (Safitri & Yuliana, 2021). Kondisi ini sering kali terjadi pada perusahaan yang memiliki prospek bisnis yang lemah atau terlibat dalam skandal keuangan, yang mengurangi kepercayaan pasar terhadap perusahaan (Safitri & Yuliana, 2021). Selain itu, pelanggaran peraturan bursa, seperti kegagalan dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu atau terlibat dalam praktik bisnis yang tidak etis, juga dapat menjadi alasan perusahaan dikenakan sanksi hingga akhirnya dikeluarkan dari bursa efek (Pradana, 2020).

Dalam konteks *financial distress*, perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas yang rendah dan tingkat utang yang tinggi lebih rentan mengalami masalah keuangan yang serius (Nilasari & Ismunawan, 2021). Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban utang tepat waktu dapat menyebabkan kebangkrutan dan akhirnya memicu keputusan delisting oleh BEI (Sintia & Rays, 2022). Perusahaan dengan struktur modal yang tidak sehat, di mana ketergantungan terhadap utang lebih besar dibandingkan modal sendiri, akan menghadapi tekanan keuangan yang lebih tinggi saat suku bunga naik atau ketika terjadi perlambatan ekonomi yang menyebabkan penurunan pendapatan (Lausiri & Nahda, 2022). *Financial distress* merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap delisting

perusahaan dari bursa saham, terutama jika perusahaan tidak mampu mempertahankan likuiditas dan profitabilitasnya (Rahma & Dillak, 2021). Perusahaan yang tidak mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi dan memiliki kinerja keuangan yang terus menurun berisiko kehilangan kepercayaan investor serta menghadapi sanksi dari otoritas bursa (Aksa & Tangngisalu, 2024)).

Financial distress merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang signifikan, yang dapat berujung pada kebangkrutan jika tidak segera diatasi (Nilasari & Ismunawan, 2021). Kondisi ini sering kali ditandai dengan menurunnya likuiditas, meningkatnya rasio utang terhadap ekuitas, serta kesulitan dalam membayar kewajiban keuangan (Rahma & Dillak, 2021). *Financial distress* tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada pemangku kepentingan lainnya, seperti investor, kreditor, dan karyawan (Azizah & Yunita, 2022).

Perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung menghadapi tantangan dalam memperoleh pendanaan eksternal karena meningkatnya risiko gagal bayar (Pradana, 2020). Hal ini menyebabkan perusahaan tidak mampu melakukan ekspansi atau bahkan mempertahankan operasi bisnisnya, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kebangkrutan (Rahma & Dillak, 2021). Dalam konteks sektor manufaktur, *financial distress* dapat diperburuk oleh ketergantungan pada bahan baku impor, fluktuasi nilai tukar, serta tekanan inflasi yang mengurangi daya beli konsumen dan profitabilitas perusahaan (Nilasari & Ismunawan, 2021).

Meskipun *Financial distress* dapat diprediksi melalui berbagai rasio keuangan dan model tertentu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro juga

memainkan peran penting dalam memperburuk atau mempercepat terjadinya krisis keuangan pada perusahaan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan adalah inflasi. Peningkatan inflasi yang signifikan dapat mengganggu struktur biaya perusahaan, terutama dalam sektor manufaktur, sehingga meningkatkan risiko kesulitan keuangan yang lebih besar (Hidayat dkk., 2021).

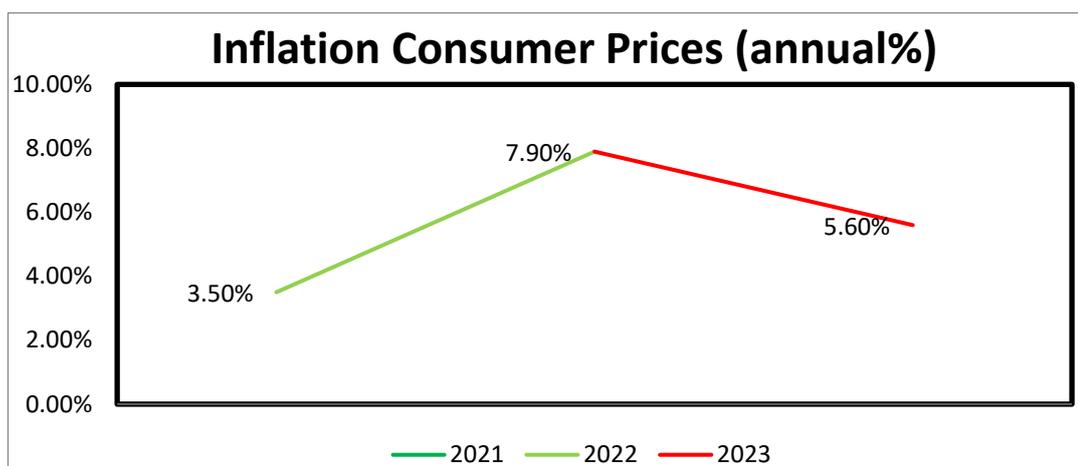
Berdasarkan data dari World Bank Group, tingkat inflasi konsumen mengalami peningkatan signifikan dari 3.50% pada tahun 2021 menjadi 7.90% pada tahun 2022 sebelum menurun menjadi 5.60% pada tahun 2023. Lonjakan inflasi ini memberikan tekanan besar pada perusahaan manufaktur di Indonesia karena meningkatnya harga bahan baku, energi, dan biaya operasional lainnya (Fatmayuni dkk., 2024). Perusahaan yang tidak memiliki struktur modal yang kuat, seperti *Solvency ratio* (SR) yang rendah, akan lebih rentan terhadap dampak inflasi ini (Safitri & Yuliana, 2021). Hal ini berdampak pada ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang mereka, yang pada akhirnya dapat memperbesar risiko *Financial distress* (Ramadhany & Syofyan, 2021).

Berdasarkan data dari World Bank Group, tingkat inflasi konsumen mengalami peningkatan signifikan dari 3.50% pada tahun 2021 menjadi 7.90% pada tahun 2022 sebelum menurun menjadi 5.60% pada tahun 2023. Lonjakan inflasi ini memberikan tekanan besar pada perusahaan manufaktur di Indonesia karena meningkatnya harga bahan baku, energi, dan biaya operasional lainnya (Fatmayuni dkk., 2024). Perusahaan yang tidak memiliki struktur modal yang kuat, seperti *Solvency ratio* (SR) yang rendah, akan lebih rentan terhadap dampak inflasi

ini (Safitri & Yuliana, 2021). Hal ini berdampak pada ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang mereka, yang pada akhirnya dapat memperbesar risiko *Financial distress* (Ramadhany & Syofyan, 2021).

Dalam konteks *Solvency ratio* (SR), perusahaan manufaktur yang memiliki modal kerja yang rendah cenderung mengalami tekanan yang lebih besar akibat fluktuasi nilai tukar (Cahyani & Indah, 2021). *Solvency ratio* yang rendah mencerminkan keterbatasan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang, yang menjadi semakin kritis dalam situasi pelemahan rupiah yang berkepanjangan (Fatmayuni dkk., 2024).

Gambar 1. 4 Data Inflasi Global



Sumber Data : World Bank Group

Ukuran perusahaan juga menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap kenaikan inflasi dan pelemahan nilai tukar karena memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber pendanaan, diversifikasi produk, serta kemampuan untuk menegosiasikan harga bahan baku dalam skala yang lebih besar (Cahyani & Indah, 2021). Selain itu, perusahaan besar

umumnya memiliki struktur manajemen risiko yang lebih matang dan akses ke instrumen keuangan seperti lindung nilai (*hedging*) untuk mengelola risiko nilai tukar (Fatmayuni dkk., 2024).

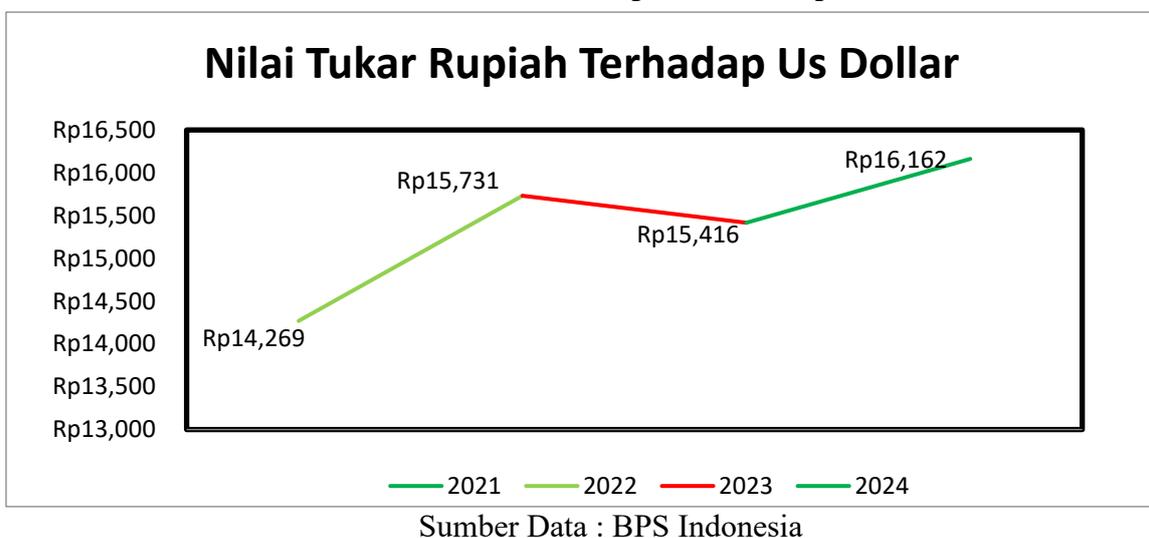
Sebaliknya, perusahaan manufaktur skala kecil dan menengah lebih rentan terhadap dampak ekonomi makro karena ketergantungan mereka pada sumber pendanaan eksternal dan keterbatasan dalam menyesuaikan harga jual produk (Ramadhany & Syofyan, 2021). Mereka juga cenderung memiliki modal kerja yang lebih terbatas, sehingga tidak mampu menahan lonjakan biaya produksi yang disebabkan oleh inflasi dan nilai tukar yang berfluktuasi (Safitri & Yuliana, 2021). Studi menunjukkan bahwa perusahaan kecil memiliki risiko lebih tinggi mengalami *financial distress* dibandingkan dengan perusahaan besar yang memiliki modal dan fleksibilitas keuangan yang lebih baik (Fatmayuni dkk., 2024).

Selain inflasi, fluktuasi nilai tukar juga menjadi faktor eksternal yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan, terutama bagi sektor manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor. Perusahaan skala kecil dan menengah menghadapi tantangan lebih besar dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan nilai tukar karena keterbatasan modal dan akses terhadap strategi lindung nilai. Ketidakstabilan ini semakin meningkatkan tekanan keuangan, yang dapat memperbesar risiko *financial distress* bagi perusahaan yang tidak memiliki strategi mitigasi yang efektif (HIDAYAT DKK., 2023).

Fluktuasi nilai tukar selama periode 2021-2023 juga memainkan peran penting dalam memperburuk dampak inflasi terhadap sektor manufaktur. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing meningkatkan biaya

bahan baku impor, yang merupakan komponen utama dalam produksi manufaktur di Indonesia (Ramadhany & Syofyan, 2021). Perusahaan yang tidak memiliki strategi lindung nilai nilai tukar yang efektif berpotensi mengalami tekanan keuangan yang lebih besar, yang semakin memperbesar kemungkinan *Financial distress* (Safitri & Yuliana, 2021).

Gambar 1. 5 Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar



Berdasarkan data terbaru dari BPS Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021, nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp14.269 per USD, meningkat menjadi Rp15.731 per USD pada tahun 2022, kemudian sedikit mengalami apresiasi menjadi Rp15.416 per USD pada tahun 2023 sebelum kembali melemah ke Rp16.162 per USD pada tahun 2024. Depresiasi rupiah ini berdampak besar pada sektor manufaktur, terutama bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan nilai tukar meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan profitabilitas perusahaan (Wijaya & Suhendah, 2023). Di samping itu, perusahaan dengan eksposur utang dalam mata uang asing akan

menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar karena beban utang mereka meningkat dalam mata uang rupiah (Rahim dkk., 2023).

Pelemahan nilai tukar rupiah juga berdampak pada harga bahan baku dan komponen yang diimpor dari luar negeri. Kenaikan harga bahan baku akibat depresiasi mata uang dapat menyebabkan perusahaan kesulitan dalam mempertahankan margin keuntungan, terutama bagi perusahaan yang tidak dapat dengan mudah menaikkan harga jual produknya (Rahma & Dillak, 2021). Selain itu, fluktuasi nilai tukar menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan perusahaan manufaktur, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan akan manajemen risiko keuangan yang efektif untuk menghindari *financial distress* (Azizah & Yunita, 2022).

Dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga bahan baku dan ketidakpastian keuangan tidak hanya memengaruhi profitabilitas, tetapi juga dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Jika tekanan finansial akibat biaya produksi yang meningkat tidak dikelola dengan baik, perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan yang lebih serius. Dalam konteks ini, *financial distress* menjadi ancaman nyata bagi perusahaan manufaktur, terutama bagi mereka yang tidak memiliki strategi mitigasi risiko yang efektif dalam menghadapi volatilitas ekonomi (ELSANDI & SUFINA, 2023).

Financial distress merupakan kondisi yang terjadi ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi mengarah pada kebangkrutan jika tidak segera diatasi (Rahim dkk., 2023). Kondisi ini menjadi isu yang semakin relevan bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI),

terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan nasional yang semakin kompleks. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola aspek keuangan secara efektif dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk penurunan kinerja, hilangnya kepercayaan investor, serta potensi likuidasi aset yang mengancam keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Wijaya & Suhendah, 2023). Oleh karena itu, pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi *financial distress* menjadi penting dalam upaya mitigasi risiko dan perencanaan strategi keuangan yang berkelanjutan (Cahyani & Indah, 2021).

Solvency ratio (SR) adalah salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko finansial berdasarkan jumlah modal yang tersedia (Fatmayuni dkk., 2024). Perusahaan dengan *Solvency ratio* yang tinggi umumnya memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap ketidakpastian ekonomi dan mampu memenuhi kewajibannya dengan lebih baik (Cahyani & Indah, 2021). Sebaliknya, *Solvency ratio* yang rendah menunjukkan potensi tekanan keuangan yang dapat meningkatkan risiko *financial distress* (Nilasari & Ismunawan, 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *Solvency ratio* memiliki hubungan negatif dengan *financial distress*, di mana semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemungkinan perusahaan menghadapi kesulitan keuangan (Rahma & Dillak, 2021).

Dalam rangka meningkatkan ketahanan sektor manufaktur terhadap risiko *Financial distress*, berbagai strategi mitigasi dapat diterapkan, termasuk optimalisasi struktur modal, efisiensi operasional, serta diversifikasi sumber

pendapatan (Fatmayuni dkk., 2024). Studi terdahulu menegaskan bahwa perusahaan yang mengadopsi strategi pengelolaan risiko keuangan yang lebih efektif memiliki peluang lebih besar untuk bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global (Cahyani & Indah, 2021).

Dengan demikian, faktor ekonomi makro seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi global, inflasi yang meningkat, serta pelemahan nilai tukar rupiah memiliki dampak signifikan terhadap *Financial distress* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Situasi ini diperparah oleh ketidakseimbangan dalam *Solvency ratio* serta perbedaan ukuran perusahaan dalam menghadapi tekanan eksternal. Penelitian ini menjadi sangat relevan karena dapat memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan dalam merancang strategi keuangan yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi makroekonomi. Dengan memahami bagaimana *Solvency ratio*, ukuran perusahaan, inflasi, dan nilai tukar dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat untuk mencegah *Financial distress*.

Dalam konteks penelitian ini, akuntan—khususnya auditor eksternal—memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi kondisi financial distress. Santoso dan Suhadak (2022) menekankan bahwa financial distress sering kali mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba sebagai bentuk respon terhadap tekanan keuangan dan untuk menjaga persepsi investor. Di sinilah peran auditor eksternal, khususnya dari Kantor Akuntan Publik

(KAP) Big 4, menjadi krusial dalam meminimalkan potensi manipulasi laporan keuangan tersebut. Auditor dari KAP Big 4 diharapkan mampu memberikan pengawasan independen yang lebih kuat karena kualitas audit yang lebih tinggi. Namun, studi Santoso dan Suhadak menunjukkan bahwa dalam praktiknya, auditor KAP Big 4 belum sepenuhnya efektif dalam memoderasi pengaruh financial distress terhadap praktik manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun peran akuntan sangat relevan dalam mendeteksi dan mengendalikan risiko keuangan, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat kompleksitas masalah keuangan yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan akuntan dan auditor tetap menjadi elemen penting dalam estimasi dan mitigasi financial distress, terutama pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023, yang rentan terhadap tekanan eksternal seperti fluktuasi nilai tukar dan inflasi.

Berdasarkan fenomena yang berkaitan dengan adanya perlambatan ekonomi global dan perlambatan ekonomi Indonesia serta berbagai temuan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh *Solvency ratio*, Ukuran Perusahaan, Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Estimasi *Financial distress* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2023”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Apakah *solvency ratio* berpengaruh terhadap estimasi *financial distress* pada perusahaan?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap estimasi *financial distress* pada perusahaan?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap estimasi *financial distress* pada perusahaan?
4. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap estimasi *financial distress* pada perusahaan?
5. Apakah *solvency ratio*, ukuran perusahaan, inflasi, dan nilai tukar terhadap estimasi *financial distress* pada perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *Solvency ratio* terhadap estimasi *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat *financial distress* pada tahun 2021-2023
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh inflasi terhadap tingkat *financial distress* di sektor manufaktur pada tahun 2021-2023

4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap kondisi *financial distress* perusahaan manufaktur yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2021-2023
5. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *solvency ratio*, ukuran perusahaan, inflasi, dan nilai tukar terhadap kondisi *financial distress* perusahaan manufaktur yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2021-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi dan ekonomi makro, khususnya terkait estimasi *financial distress*.
- b) Memperjelas hubungan teoritis antara *solvency ratio*, ukuran perusahaan, inflasi, dan nilai tukar dengan kondisi *Financial distress*.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu akuntansi dan ekonomi makro, serta melatih kemampuan analitis dalam mengkaji risiko keuangan perusahaan.

b) Bagi Perusahaan

Memberikan wawasan kepada manajemen dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab financial distress dan merancang strategi mitigasi yang lebih efektif.

c) Bagi Investor

Memberikan informasi tentang faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi.